



STRATEGI KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBENTUK CITRA POSITIF ORGANISASI

Dita Maharani¹, M. Yusuf S. Barusman¹

¹ Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Corresponding Author: Dita Maharani

E-mail: jf.polppprovlampung@gmail.com

Received: Feb 02, 2026

Revised: Feb 12, 2026

Accepted: Feb 15, 2026

Online: March 08, 2026

ABSTRAK

Fenomena yang ditemukan adanya dugaan citra negatif yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan adanya komentar negatif pada salah satu akun media sosial, oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi untuk membentuk citra positif organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi, apa saja aspek yang mempengaruhi serta efektivitas strategi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan 6 (enam) informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melalui langkah-langkah menentukan khalayak, merumuskan pesan atau materi, penetapan metode, pemilihan media komunikasi, mengetahui hambatan pada saat pelaksanaan, serta efektivitas strategi dalam mempengaruhi persepsi publik sehingga membentuk citra organisasi menjadi lebih positif cukup efektif. Faktor atau aspek pendukung yang utama meliputi kemampuan komunikasi anggota serta budaya organisasi terbuka seperti kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lain maupun dengan institusi terkait, aspek pendukung lain seperti kekompakan serta solidaritas anggota, kemampuan anggota dalam menjaga emosi serta mengendalikan diri, dukungan masyarakat serta peran media yang menyampaikan informasi berimbang serta kemampuan pimpinan dalam mengarahkan anggota. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dinilai cukup efektif dalam membentuk citra positif organisasi yang ditandai dengan terbentuknya pemahaman masyarakat tentang tugas Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penurunan konflik dan resistensi pada pelaksanaan tugas, pergeseran pandangan pada media sosial menjadi dukungan serta adanya kesukarelaan masyarakat dalam mengindahkan produk hukum yang ada, jangka panjang akan menciptakan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah daerah

Kata Kunci : Strategi komunikasi; satuan polisi pamong praja; komunikasi efektif; citra organisasi.

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Maharani, D. & Barusman, M.Y.S.(2023). Strategi Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Membentuk Citra Positif Organisasi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12 (1), 1-15. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i.472>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menerima dan menyebarkan informasi. Masyarakat menjadi lebih kritis dan memiliki ruang luas untuk mengekspresikan opini negatif yang sulit dikontrol

oleh organisasi. Hal ini menciptakan tantangan serius bagi organisasi publik, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam membentuk dan mempertahankan citra positif di mata publik. Satpol PP sebagai organisasi publik memiliki tugas sentral dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, tetapi dalam pelaksanaan tugas kerap dihadapkan dengan persepsi negatif yang di masyarakat (BARAT, K. S. 2023).

Hal ini menjadi makin kompleks di masa digital karena informasi dan opini masyarakat tersebar cepat melalui media sosial dan platform digital. Persepsi yang mengasosiasikan Satpol PP dengan citra represif, otoriter, bahkan tidak humanis menjadi tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik. Situasi ini menimbulkan dilema strategis bagi Satpol PP Provinsi Lampung yang harus mengelola citra organisasinya agar tidak tercemar oleh berita dan komentar negatif di media sosial karena Satpol PP merupakan elemen penting untuk masyarakat dalam ranah keamanan dan ketertiban publik serta keterturan sosial. Fenomena negatif tersebut tercermin dalam berbagai pemberitaan *online* dan interaksi media sosial yang menyoroti insiden-insiden penertiban warga yang kerap menjadi sorotan tajam masyarakat, contohnya kasus di Sabah Balau pada Februari 2025 yang menimbulkan resistensi warga dan menyebabkan ketegangan fisik memperkuat dugaan stigma citra negatif yang melekat pada anggota Satpol PP Provinsi Lampung yang bertugas.

Pembentukan citra positif organisasi pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan strategis sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Kedudukan dan fungsi tersebut secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga menuntut kemampuan komunikasi yang efektif agar kebijakan dan tindakan yang dilakukan dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, dapat penulis identifikasi beberapa permasalahan dan akan menjadi fokus dalam penelitian yaitu:

1. Adanya dugaan Satpol PP yang tebang pilih serta represif pada saat pelaksanaan tugas, adanya berita negatif yang termuat dalam portal online, komentar negatif yang termuat dalam akun media sosial selain itu terdapat headline berita online berkonotasi negatif sehingga diduga terciptanya fenomena persepsi negatif masyarakat di media sosial tentang Satpol PP Provinsi Lampung;
 2. Dugaan ketidaktahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi Satpol PP yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta adanya cap labelling Satpol PP sebagai organisansi perangkat daerah buangan;
-

3. Berdasarkan observasi penulis belum optimalnya media sosial yang dimiliki Satpol PP Provinsi Lampung untuk mempublikasikan kegiatan yang menjadi tugas Satpol PP sesuai dengan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP;
4. Belum diketahuinya kerangka strategi komunikasi organisasi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung dalam membangun citra positif organisasi, serta apa saja aspek yang mempengaruhi penerapan strategi komunikasi dalam membentuk citra positif organisasi serta bagaimana efektivitas strategi tersebut dalam membentuk citra positif organisasi.
5. Terbatasnya kajian ilmiah dan penelitian spesifik yang membahas strategi komunikasi dalam membentuk citra positif organisasi, organisasi yang dimaksud adalah Satpol PP Provinsi Lampung.

Pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Ropii, A. 2024). Peraturan ini menegaskan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Satpol PP secara yuridis mengandung dimensi komunikasi publik yang kuat, karena setiap tindakan penegakan hukum administratif harus disertai dengan penyampaian informasi, pendekatan persuasif, dan edukasi kepada masyarakat. Ketidaktepatan strategi komunikasi dalam pelaksanaan tugas tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan memperkuat stigma represif terhadap Satpol PP (Darmawan, D. 2019).

Kedudukan Satpol PP di Provinsi Lampung sebagai perangkat daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peraturan gubernur yang mengatur tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Lampung. Regulasi daerah tersebut menegaskan bahwa Satpol PP Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam mendukung visi pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berlandaskan prinsip pelayanan publik. Akan tetapi bahwa citra Satpol PP di mata masyarakat masih sering diidentikkan dengan tindakan penertiban yang keras dan kurang humanis, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kegiatan penegakan peraturan daerah.

Persepsi negatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek komunikasi organisasi yang belum sepenuhnya terkelola secara strategis. Dalam era keterbukaan informasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap lembaga pemerintah, termasuk Satpol PP Provinsi Lampung, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara benar, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Komunikasi publik yang tidak terencana dan tidak terkoordinasi dengan baik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, resistensi masyarakat, bahkan delegitimasi terhadap kewenangan institusi. Oleh karena itu, strategi komunikasi menjadi instrumen penting bagi Satpol PP Provinsi Lampung dalam

membangun citra positif organisasi yang profesional, humanis, dan akuntabel (Mokat, I. T., Muaja, H. S., & Pongkorung, F. 2025).

Selain itu, tuntutan terhadap pembentukan citra positif organisasi Satpol PP juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi komunikasi yang efektif memungkinkan Satpol PP Provinsi Lampung tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum administratif, tetapi juga membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat sebagai subjek pelayanan publik. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan, legitimasi sosial, dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Keberhasilan strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Aspek internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur kelembagaan, serta koordinasi antarunit kerja. Sementara itu, aspek eksternal mencakup karakteristik masyarakat, peran media massa dan media sosial, serta dinamika sosial dan politik di daerah. Efektivitas strategi komunikasi dalam membentuk citra positif organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan Satpol PP Provinsi Lampung dalam mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam kebijakan dan praktik komunikasi yang konsisten dengan nilai-nilai hukum dan pelayanan publik.

Kajian mengenai strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung memiliki relevansi yuridis dan praktis yang kuat. Secara yuridis, penelitian ini berangkat dari kerangka hukum yang mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah. Secara praktis, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan akan strategi komunikasi yang mampu membentuk citra positif organisasi di tengah tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih humanis dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi, aspek-aspek yang mempengaruhi penerapan strategi komunikasi tersebut, serta efektivitasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013). Hal ini membuktikan empat istilah yang paling penting yaitu teknik ilmiah data, tujuan dan kegunaan. Pendekatan penelitian ini memiliki ciri-ciri metodis, empiris dan tentu saja logis. Berdasarkan hal-hal tersebut pendekatan yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan melakukan analisis komprehensif yang bersifat dinamis yaitu dapat berkembang sesuai kebutuhan lapangan. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi strategi serta hambatan dalam membangun citra positif organisasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang realitas komunikasi Satpol PP dalam

konteks digital sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif. Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dalam Membentuk Citra Positif Organisasi

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi dilakukan melalui kombinasi komunikasi internal dan eksternal yang terintegrasi. Komunikasi internal diarahkan pada pembentukan kesamaan persepsi, sikap, dan pemahaman anggota terhadap tugas dan fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah yang humanis dan berorientasi pelayanan publik. Sementara itu, komunikasi eksternal difokuskan pada upaya penyampaian informasi kebijakan, kegiatan penegakan peraturan daerah, serta edukasi kepada masyarakat agar peran dan kewenangan Satpol PP dapat dipahami secara utuh dan proporsional. Satpol PP Provinsi Lampung memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau publik, baik melalui komunikasi tatap muka, media massa, maupun media sosial resmi institusi. Media sosial digunakan sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kegiatan, klarifikasi isu, serta membangun narasi positif mengenai kinerja organisasi. Penggunaan media tersebut dinilai mampu mempercepat penyebaran informasi sekaligus menjadi ruang interaksi antara Satpol PP dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas dan konsistensi pesan yang disampaikan melalui media sosial berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan dan pengenalan publik terhadap fungsi Satpol PP (Dahwir, A., & Bahri, S. 2024).

Selain media, pendekatan persuasif menjadi bagian penting dari strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung, terutama dalam kegiatan penertiban di lapangan. Aparat Satpol PP diarahkan untuk mengedepankan komunikasi dialogis, pemberian pemahaman, serta sosialisasi sebelum tindakan penegakan dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik sekaligus membangun citra Satpol PP sebagai institusi yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan persuasif ini relatif lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan tindakan yang bersifat koersif. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi penerapan strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi. Aspek internal meliputi kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan komunikasi aparat di lapangan, serta budaya organisasi yang masih kuat dengan pendekatan komando. Aspek eksternal meliputi karakteristik masyarakat, persepsi publik yang telah terbentuk sebelumnya, serta peran media dalam membingkai aktivitas Satpol PP. Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan kepada masyarakat.

Efektifitas strategi komunikasi yang diterapkan Satpol PP Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam membangun citra positif organisasi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tugas dan fungsi Satpol PP, serta berkurangnya resistensi

dalam beberapa kegiatan penertiban. Akan tetapi, citra negatif yang telah lama melekat masih menjadi tantangan utama, terutama ketika terjadi tindakan penegakan yang terekam dan disebarluaskan tanpa konteks yang utuh melalui media social (Roza, D., & Helen, Z. 2024).

Konsistensi pesan dan koordinasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam keberhasilan strategi komunikasi organisasi. Ketidaksinkronan antara kebijakan pimpinan dan praktik komunikasi di lapangan berpotensi melemahkan citra positif yang ingin dibangun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi internal melalui pelatihan, pembinaan, serta pedoman komunikasi yang jelas agar seluruh aparat Satpol PP memiliki standar komunikasi yang seragam dalam berinteraksi dengan masyarakat. Strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi telah berjalan ke arah yang lebih partisipatif dan transparan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan media dan opini publik. Strategi komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen membangun kepercayaan dan legitimasi sosial terhadap Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Strategi dalam tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Barusman et al., 2021). Strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dalam (Wenxiu, 2015) dirumuskan melalui formula sederhana, yaitu *"Who says what in which channel to whom with what effect?"*. Formula ini menggambarkan bahwa terdapat lima elemen utama yang mempengaruhi strategi komunikasi. Pertama, (*Who*) yang diperuntukan untuk komunikator yaitu pihak yang akan melakukan komunikasi seperti individu, kelompok ataupun organisasi yang akan menyampaikan suatu pesan. Kedua, (*Says What*) yaitu isi dari pesan yang disampaikan, termasuk informasi, ide, atau gagasan yang ingin dikomunikasikan. Ketiga, media (*In Which Channel*), yang merupakan saluran komunikasi yang digunakan, seperti televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial. Keempat, komunikan (*To Whom*), yaitu audiens atau penerima pesan yang menjadi target komunikasi. Terakhir, feedback (*With What Effect*), yang merujuk pada efek atau dampak yang diharapkan dari proses komunikasi tersebut, seperti perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku dari penerima pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi menurut pendapat Suprpto dalam (S. M. et. al Harahap, 2022) yaitu:

1. Mengenal khalayak

Agar mencapai komunikasi yang efektif langkah awal yang diperlukan adalah memahami dan mengenali khalayak, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu menyesuaikan dengan sasaran peraturan daerah serta menurunkan tim intel untuk melakukan deteksi dini serta identifikasi karakteristik dari sasaran perda maupun lingkungannya, selaras dengan hasil penelitian oleh informan 1 sebagai berikut: "Sebelum pelaksanaan tugas, diturunkan Tim Intel Satpol PP Provinsi Lampung untuk melakukan deteksi dini seperti bagaimana karakteristik warga sekitar, suku apa yang dominan,

bagaimana kondisi lingkungannya, hal tersebut diperlukan sebagai identifikasi awal bentuk komunikasi seperti apa yang harus kita terapkan. Kita juga berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat dan tokoh adat terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas lebih jauh karena dengan berkomunikasi dengan orang yang dianggap penting serta memahami karakter kelompok masyarakat atau sasaran kegiatan akan semakin memudahkan kita untuk bisa mencapai komunikasi yang efektif serta dapat mewujudkan tujuan kegiatan dan tujuan organisasi.” (sumber : wawancara 2025)”

2. Menyusun pesan

Merumuskan pesan atau materi memiliki arti merancang pesan dengan menentukan tema dan materi yang sesuai. Pada perumusan materi terjadi komunikasi internal yaitu kepala bidang-kepala seksi-staf, lalu komunikasi eksternal tim intel kepada masyarakat, tahap ini akan disesuaikan dengan rencana kegiatan dan hasil laporan dari tim intel Satpol PP Provinsi Lampung yang diturunkan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk bisa memberikan informasi tentang karakteristik, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sasaran kegiatan serta melakukan pendekatan psikologi kepada masyarakat dengan berkomunikasi dengan yang dituakan, selaras dengan hasil penelitian sebagai berikut: ” Pembuatan materi atau bahan yang akan disampaikan juga memerhatikan produk hukum daerah yang akan di tegakan, mengumpulkan data dari tim intel untuk mengetahui karakteristik target sasaran, meminta riviur dari kepala seksi jika tidak ada tambahan maka kepala seksi memberikan paraf, dan diteruskan ke kepala bidang untuk melakukan tinjauan, setelah itu bahan/materi baru bisa diperbanyak.” (sumber : wawancara 2025)

3. Menetapkan metode

Agar komunikasi dapat berjalan efektif diperlukan metode sebagai alat penyampaian informasi kepada target sasaran, terdiri dari metode persuasif, edukatif, informatif dan koersif. Pada penelitian ini metode yang paling tepat adalah metode persuasif, edukatif serta informatif seperti kegiatan sosialisasi tentang membayar PKB, pengawasan dan pembinaan terhadap izin usaha, Satpol PP Goes to School ke SMA/SMK se-Provinsi Lampung serta sosialisasi pada pedagang di sepanjang Jl. Ryacudu dinilai cukup efektif dalam merubah mindset tentang Satpol PP karena melibatkan serta berinteraksi langsung kepada sasaran kegiatan dengan humanis, hasil kegiatan dipublikasikan melalui media sosial yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk bisa menyebarkan informasi secara *realtime* serta transparan. Sejalan seperti hasil penelitian sebagai berikut: ”Menurut pendapat saya, metode yang paling tepat untuk mengubah citra Polisi Pamong Praja adalah metode edukatif dan informatif. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat dapat memahami tugas, fungsi, serta peran Pol PP secara utuh, sehingga tidak hanya dipandang sebagai aparat penertiban semata. Sementara itu, metode informatif melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus membangun citra Pol PP yang humanis, profesional, dan melayani. Setelah melakukan berbagai macam metode pada kegiatan akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui metode apa yang cocok untuk diterapkan” (sumber : wawancara 2025)”

Selaras dengan hasil penelitian pada Satpol PP Kabupaten Demak dalam (Wardana Gilang Wisnu, 2023) yang menunjukkan bahwa citra positif kunci bagi suatu organisasi dalam mempengaruhi persepsi masyarakat, pada penerapannya salah satu strategi komunikasi melalui kegiatan Penyakit masyarakat (PEKAT), sosialisasi peraturan daerah, serta kegiatan pembinaan masyarakat

4. Penggunaan Media

Penggunaan media berperan sebagai sarana penyalur ide untuk meraih pengaruh di masyarakat. Pada penelitian ini media yang paling sering digunakan adalah instagram @prajawibawalampung, namun dalam pengelolaannya belum optimal dikarenakan belum adanya staf khusus yang mengelola media sosial serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola media sosial baik dalam infografis, menulis caption serta membuat konten yang menarik, seperti dijelaskan dalam hasil penelitian: "Untuk saat ini media yang dipakai untuk publikasi adalah instagram Satpol PP Provinsi Lampung, tetapi menurut saya itupun tidak optimal" (wawancara 2025)"

Kerjasama dengan portal berita online belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kurangnya rilis berita yang objektif tentang kegiatan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung serta belum adanya kerjasama dengan akun-akun besar seperti @lampunggeh atau @infokiyay maupun antar OPD yang bisa menjangkau audiens lebih besar, berikut merupakan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Informan 2: "Tidak ada kerjasama, seperti yang saya jelaskan bahwa jika memiliki anggaran lebih maka berita pelaksanaan tugas penutupan tempat hiburan malam atau misal pengawasan gabah yang baru-baru ini dilakukan akan dipublish pada berita online, saat ini sedang ada rekayasa besar-besaran jadi lebih mempersulit kami dalam mendapatkan anggaran kegiatan" (wawancara 2025)

5. Hambatan

Hambatan internal yaitu pertama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan dalam pengelolaan media sosial, kedua keterbatasan anggaran yang memengaruhi peningkatan kapasitas komunikasi publik, kemampuan mediasi anggota serta sarana dan prasarana dalam mengedukasi masyarakat. Hambatan eksternal kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas Satpol PP yang diamanatkan undang-undang, kurangnya pemahaman tentang kewenangan Satpol PP Provinsi Lampung, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat jika telah melanggar produk hukum daerah, serta adanya stigma negatif masyarakat tentang Satpol PP yang tebang pilih dan represif sehingga terjadi resistensi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Kendala Internal diantaranya Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi persuasif dan pemahaman mendalam tentang pendekatan humanis dalam penertiban. Serta Sarana dan prasarana pendukung komunikasi publik, seperti media informasi dan konten edukatif, masih belum optimal. Kendala Eksternal: Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pedagang, terhadap

peraturan daerah yang berlaku dan Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap Satpol PP akibat persepsi penertiban yang dianggap represif” (wawancara 2025)

Hasil penelitian tersebut selaras dengan pandangan Wibowo dkk (Alsian, 2025) dimana hambatan komunikasi dalam organisasi pemerintahan diantaranya human capital (SDM), *organizational culture* dan *technological readiness*.

Aspek yang Mempengaruhi Penerapan Strategi Komunikasi dalam Membentuk Citra Positif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Kemampuan komunikasi anggota Satpol PP yang menjadi jembatan utama antara rencana organisasi dan eksekusi lapangan, dimana pesan dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat untuk membentuk citra positif. Tanpa kemampuan ini, strategi seperti pendekatan humanis atau persuasif akan gagal diterjemahkan dengan baik oleh sasaran perda yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau resistensi yang merusak persepsi public. Kemampuan verbal, nonverbal, empati, dan mendengar aktif menentukan keberhasilan penyampaian pesan akurat tentang tupoksi Satpol PP, sehingga strategi sosialisasi perda menjadi persuasif bukan konfrontatif. Selaras dengan penelitian (Redaputri & Barusman, 2018) yang mengemukakan bahwa perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan knowledge, skill, dan attitude. Selaras dengan hasil penelitian sebagai berikut:

“Menurut saya pribadi sangat penting, sebagai penegak perda dan perpanjangan lidah dari pemerintah daerah seperti mensosialisasikan produk hukum daerah harus memiliki kemampuan tersebut, jika tidak apa yang menjadi tujuan dari pemerintah daerah meskipun niatnya baik jika tidak memiliki kemampuan tersebut akan sulit diterima oleh masyarakat” (wawancara 2025)

Kolaborasi antar OPD dan instansi terkait seperti jika kegiatan sosialisasi perda tentang trantibumlinmas, KTR, Narkotika dengan sasaran target siswa/i maka berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, penertiban aset dengan BPKAD, pengawasan izin usaha dengan DPMPTSP dan juga Dinas Pariwisata dan Korwas PPPNS yang berasal dari POLDA Lampung, Penyuluhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan BAPENDA, DBHCHT dengan Bea Cukai. Budaya organisasi terbuka di Satpol PP Provinsi Lampung ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi stigma negatif dan memperkuat profesionalisme organisasi selain itu kolaborasi dapat mendorong strategi komunikasi persuasif-edukatif, seperti pendekatan humanis dan media sosial untuk transparansi, yang mengubah persepsi negatif menjadi positif, dengan hasil wawancara oleh informan sebagai berikut:

”Belum lama ini kami telah memulai koordinasi dan Rapat bersama Bea Cukai Kanwil Lampung terkait dengan kegiatan DBHCHT, sebelumnya kami banyak bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata serta Dinas PTSP tahun 2023-2024 kami ke-15 Kabupataen Kota untuk mensosialisasikan ke badan usaha, kolam renang, tempat biliard yang masuk kategori menengah tinggi karena merupakan kewenangan Provinsi untuk segera migrasi izin usaha ke OSS RBA. Pengawasan perizinan berkoodinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup beserta Dinas Pertambangan, Dinas

Pendidikan untuk sosialisasi perda trantibumlinmas, Narkoba, serta KTR” (wawancara 2025).

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan aspek pendukung lain dalam mensukseskan strategi komunikasi sebagai berikut:

1. Kekompakan dan solidaritas agar pesan yang disampaikan konsisten dan tidak menimbulkan kesan arogan.
2. Kemampuan anggota dalam menjaga emosi serta mengendalikan diri saat menghadapi situasi yang provokatif juga menjadi kunci terciptanya komunikasi yang efektif.
3. Dukungan masyarakat dan peran media yang menyampaikan informasi secara berimbang turut memperkuat upaya pembentukan citra positif organisasi.
4. Kemampuan pemimpin untuk mengarahkan anggotanya serta pola komunikasi antara pimpinan dan anggota serta kemampuan pimpinan dalam melihat kapabilitas anggota dalam pembagian tugas, agar anggota sadar akan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas.

Penerapan strategi komunikasi dalam membentuk citra positif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dipengaruhi oleh sejumlah aspek yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Aspek internal menjadi fondasi utama dalam menentukan kualitas pesan, cara penyampaian, serta konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh aparat Satpol PP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan komunikasi interpersonal aparat di lapangan, sangat menentukan bagaimana institusi dipersepsikan oleh masyarakat. Aparat yang mampu menyampaikan pesan secara persuasif, santun, dan komunikatif cenderung lebih berhasil menciptakan interaksi yang positif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat instruktif dan kaku.

Budaya organisasi Satpol PP Provinsi Lampung juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi penerapan strategi komunikasi. Budaya kerja yang masih menekankan pola komando dan penegakan kewenangan sering kali membatasi ruang dialog antara aparat dan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada cara komunikasi dilakukan, terutama dalam kegiatan penertiban yang berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Penelitian menemukan bahwa ketika budaya organisasi mulai diarahkan pada nilai-nilai pelayanan publik dan pendekatan humanis, strategi komunikasi menjadi lebih adaptif dan mampu mereduksi citra negatif yang selama ini melekat pada Satpol PP.

Aspek kepemimpinan turut berperan signifikan dalam menentukan arah dan efektivitas strategi komunikasi organisasi. Kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pengelolaan citra organisasi cenderung mendorong aparat untuk berkomunikasi secara lebih profesional dan terkoordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan dalam mengarahkan pola komunikasi, baik melalui pedoman kerja maupun arahan langsung, berpengaruh terhadap keseragaman pesan yang disampaikan kepada publik. Ketidakkonsistenan arahan pimpinan berpotensi menimbulkan perbedaan praktik komunikasi di lapangan yang pada akhirnya memengaruhi citra organisasi.

Selain aspek internal, faktor eksternal juga mempengaruhi penerapan strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung. Karakteristik masyarakat yang heterogen, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun tingkat pemahaman hukum, menuntut strategi komunikasi yang kontekstual dan fleksibel. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat cenderung kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kemampuan Satpol PP dalam membaca situasi sosial dan menyesuaikan pesan komunikasi menjadi faktor penting dalam membentuk citra positif organisasi.

Peran media massa dan media sosial menjadi aspek eksternal lain yang sangat berpengaruh dalam pembentukan citra Satpol PP Provinsi Lampung. Pemberitaan media dan konten yang beredar di media sosial sering kali membingkai tindakan Satpol PP secara selektif, sehingga memengaruhi persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengelolaan komunikasi media secara proaktif dapat memperkuat citra negatif, terutama ketika terjadi tindakan penegakan yang menimbulkan kontroversi. Sebaliknya, pengelolaan media yang terencana dan responsif mampu menjadi sarana klarifikasi serta pembentukan narasi positif mengenai kinerja organisasi.

Aspek regulasi dan kebijakan internal organisasi juga mempengaruhi penerapan strategi komunikasi. Keberadaan aturan yang mengatur tata cara komunikasi publik, penggunaan media sosial, serta mekanisme penyampaian informasi menjadi pedoman penting bagi aparat Satpol PP dalam berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan pedoman komunikasi yang bersifat teknis sering kali membuat aparat di lapangan menggunakan pendekatan personal yang belum tentu sejalan dengan citra organisasi yang ingin dibangun. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi internal sebagai landasan penerapan strategi komunikasi yang konsisten.

Penerapan strategi komunikasi dalam membentuk citra positif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal organisasi. Keberhasilan strategi komunikasi tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kapasitas aparat, budaya organisasi, kepemimpinan, karakteristik masyarakat, serta pengelolaan media dan kebijakan internal. Oleh karena itu, upaya membentuk citra positif organisasi memerlukan pendekatan komunikasi yang komprehensif, terencana, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Satpol PP Provinsi Lampung.

Efektivitas Strategi Komunikasi dalam Membentuk Citra Positif Organisasi

Efektivitas strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi dapat dijelaskan secara teoritis melalui pendekatan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif menekankan pada upaya memengaruhi sikap, pemahaman, dan perilaku audiens melalui penyampaian pesan yang rasional, emosional, dan etis tanpa paksaan. Dalam konteks Satpol PP Provinsi Lampung, pendekatan persuasif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, dialog langsung dengan masyarakat, serta penyampaian informasi yang menekankan tujuan penegakan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan kepentingan umum. Strategi ini terbukti mampu

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta mengurangi resistensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi persuasif memiliki peran strategis dalam membangun citra organisasi publik yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

Strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung mencerminkan fungsi kehumasan pemerintah yang bertujuan membangun hubungan saling pengertian antara institusi dan masyarakat. *Public relations* pemerintah tidak semata-mata berfungsi sebagai penyampai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola opini publik dan pembentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pemanfaatan media sosial resmi, klarifikasi isu, serta penyampaian informasi kegiatan secara terbuka menunjukkan upaya Satpol PP dalam menjalankan fungsi komunikasi dua arah yang partisipatif. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya pergeseran komentar masyarakat dari bernuansa negatif menjadi lebih objektif dan mendukung mengindikasikan keberhasilan fungsi *public relations* pemerintah dalam membangun citra positif dan reputasi organisasi yang lebih profesional.

Penguatan strategi komunikasi melalui *public relations* pemerintah juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung melalui berbagai kanal komunikasi menjadi landasan yuridis dalam membangun kepercayaan publik. Keterbukaan tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembentukan citra positif organisasi dan penguatan legitimasi sosial.

Berdasarkan *legitimacy theory* yang menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat bergantung pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap nilai, tujuan, dan tindakan organisasi tersebut. Legitimasi tidak hanya diperoleh melalui dasar hukum formal, tetapi juga melalui kesesuaian antara tindakan organisasi dan harapan sosial masyarakat. Dalam konteks Satpol PP Provinsi Lampung, meskipun legitimasi formal telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, legitimasi sosial tetap harus dibangun melalui praktik komunikasi yang humanis, transparan, dan responsif terhadap masyarakat. Strategi komunikasi yang efektif terbukti mampu memperkuat legitimasi tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya kesukarelaan masyarakat dalam mengindahkan peraturan daerah serta tumbuhnya kepercayaan terhadap Satpol PP dan pemerintah daerah.

Temuan penelitian yang menunjukkan bertumbuhnya legitimasi masyarakat terhadap Satpol PP Provinsi Lampung sejalan dengan pandangan Fombrun dan van Riel yang menyatakan bahwa reputasi organisasi yang kuat dapat memberikan “*license to operate*” dari publik. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara kewenangan hukum dan penerimaan sosial. Ketika masyarakat memahami dasar hukum, tujuan, dan manfaat dari penegakan peraturan daerah, tindakan Satpol PP tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari upaya

menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi sosial tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan koersif, tetapi harus didukung oleh strategi komunikasi yang persuasif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Strategi komunikasi yang diterapkan juga berdampak pada peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP Provinsi Lampung. Kesadaran aparat akan pentingnya komunikasi yang persuasif dan humanis menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai pelayanan publik dalam budaya organisasi. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi norma hukum, hak asasi manusia, serta nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya diposisikan sebagai alat teknis, tetapi sebagai bagian dari etika profesional aparat penegak peraturan daerah. Selain itu, peningkatan koordinasi antaranggota dan dengan perangkat daerah lainnya mencerminkan fungsi komunikasi organisasi yang berjalan secara efektif. Koordinasi yang baik memperkuat konsistensi pesan dan tindakan Satpol PP, sehingga menghindari kontradiksi yang dapat merusak citra organisasi. Dalam kerangka teori komunikasi organisasi, konsistensi internal merupakan prasyarat utama dalam membangun citra eksternal yang kredibel. Ketika pesan yang disampaikan selaras dengan tindakan di lapangan, kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin menguat.

Efektivitas strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi dapat dijelaskan secara komprehensif melalui teori komunikasi persuasif, *public relations* pemerintah, dan *legitimacy theory*, serta memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Strategi komunikasi yang humanis namun tetap tegas tidak hanya memperkuat citra dan reputasi organisasi, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi telah berjalan secara efektif dan terarah. Strategi tersebut diwujudkan melalui pendekatan komunikasi persuasif, humanis, dan informatif yang dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui pemanfaatan media sosial resmi. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menurunkan tingkat resistensi dan konflik dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Keberhasilan penerapan strategi komunikasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek internal dan eksternal organisasi. Aspek internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kesadaran anggota terhadap pentingnya komunikasi yang persuasif, budaya organisasi, serta koordinasi antaranggota dan dengan perangkat daerah lainnya. Sementara itu, aspek eksternal mencakup karakteristik dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, persepsi publik yang telah terbentuk sebelumnya, serta peran media dan media sosial

dalam membentuk opini publik. Sinergi antara faktor-faktor tersebut menentukan efektivitas strategi komunikasi dalam membangun citra positif Satpol PP Provinsi Lampung.

Secara teoretis dan yuridis, temuan penelitian ini menguatkan relevansi teori komunikasi persuasif, *public relations* pemerintah, dan *legitimacy theory* dalam konteks organisasi penegak peraturan daerah. Pembentukan citra positif Satpol PP Provinsi Lampung tidak hanya bergantung pada kewenangan hukum formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam membangun legitimasi sosial melalui komunikasi yang transparan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, strategi komunikasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsani, M. A. (2025). *Strategi Komunikasi Protokol dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung*. Universitas Bandar Lampung
- Masysyath, Hasan & Umar, Umar & Husni, Husni. (2023). Analisis Operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara*. 17. 1580. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.646>.
- Barusman, M. Yusuf S & salam, Teddy Viori & Redaputri, Appin Purisky, 2021. "Analisis Strategi Bisnis Marley's Cafe Coffee and Resto Bandar Lampung," OSF Preprints 25hyp, Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/25hyp>
- Dahwir, A., & Bahri, S. (2024). Analisis Yuridis Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Tim Deteksi Dan Cegah Dini Satpol Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Pp Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Ilmiah Hukum Yustitia Rahmadiyah*, 1(1), 1-10. Retrieved from <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/yustitia/article/view/368>.
- Darmawan, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Harahap, S. M. et. al. (2022). *Strategi Komunikasi Organisasi* (1st ed.). PRENADA.
- Mokat, Inda Tarry, Harly Stanly Muaja, and Fonnyke Pongkorung. "Tinjauan Yuridis Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado." *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61859>
- Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung: Economic Development Strategy Of Lampung Province. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(2), 86–93. <https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340>
- Ropii, Ahmad. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Etika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
-

-
- 16 Tahun 2018." *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 2 (2024): 113-122. DOI: <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i2.010>
- Roza, D. and Helen, Z., 2024. Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(1), pp.1-9. DOI: <https://doi.org/10.31933/vffwyw90>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Wardana Gilang Wisnu, R. A. (2023). *Strategi Komunikasi Satpol Pp Kabupaten Demak Dalam Membentuk Citra Positif Organisasi*. 1–24.
- Wenxiu, P. (2015). *Analysis of New Media Communication Based on Lasswell's " 5W " Model*. *Journal of Educational and Social Research*, MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(3), 245–250. <https://doi.org/10.5901/jesr.2015.v5n3p245>
-

Copyright Holder :

© Dita Maharani & M. Yusuf S. Barusman. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

